

## **Implementasi Nilai Pancasila sebagai Dasar Hukum Humanis Terhadap Karakter Bangsa**

**Ar Rahiim Innash**

Pascasarjana, Universitas Ngudi Waluyo  
Email : rahmiinash@gmail.com

### **Abstrak**

Jika memperhatikan hukum yang ada di Indonesia selama ini terdapat dasar hukum yang sangat melekat erat pada Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, Dimana dalam Bhinneka Tunggal Ika terdapat simbol Pancasila sebagai prasasti dasar hukum negara Indonesia. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 5 sila. Nilai keagamaan yaitu dalam sila 1, nilai kemanusiaan dalam sila 2, nilai persatuan dalam sila ke 3, nilai kerakyatan dalam sila 4 dan yang terakhir nilai keadilan dalam sila 5. Dengan demikian Masyarakat menganggap bahwa karakter bangsa Indonesia tercermin melalui Pancasila. Pemikiran dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk melakukan refleksi mendalam dan serius dalam menelaah ilmu pengetahuan serta nilai-nilai Pancasila yang berkembang dalam pelaksanaan pendidikan di era globalisasi, yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah konsep atau teori. Pendidikan di Indonesia dianggap kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominasi atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka.

**Kata Kunci :** Pancasila, Nilai, Karakter Bangsa

### **Abstract**

*If we observe the existing legal system in Indonesia, there is a foundational legal principle that is deeply rooted in the country, namely Bhinneka Tunggal Ika, which means "Unity in Diversity." Within Bhinneka Tunggal Ika lies the emblem of Pancasila as the cornerstone of Indonesia's national legal foundation. The values contained in Pancasila are reflected in its five principles: religious values in the first principle, humanitarian values in the second, unity in the third, democracy in the fourth, and justice in the fifth principle. Thus, society believes that the character of the Indonesian nation is embodied in Pancasila. Thought can be seen as an effort to deeply and seriously reflect on the body of knowledge and the values of Pancasila that have developed in the implementation of education in the era of globalization, which are subsequently formulated into a concept or theory. Education in Indonesia is seen as being less grounded in character education based on Pancasila, and instead tends to prioritize or even boast of an education system that focuses merely on cognitive logical reasoning.*

**Keyword :** Pancasila, Values, National Character

### **Pendahuluan**

Era reformasi di Indonesia dewasa ini yang makin kuat dipengaruhi oleh proses globalisasi membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara Indonesia. Di samping harus diakui bahwa proses globalisasi membawa dampak positif pada terutama aspek pertumbuhan ekonomi, dampak negatif juga tidak dapat dihindarkan. Salah satu dampak negative yang makin kuat menggejala dewasa ini adalah makin melemahnya karakter dan kepribadian kehidupan berbangsa Indonesia. (adminpkn,+36)

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kondisi seperti ini. Praktik penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang terjadi dalam pengalaman Sejarah perkembangan NKRI, belum tersosialisasikannya dengan baik eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, gamangnya kebijakan pemerintah dalam proses pemasyarakatan dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila, dan karena pengaruh ideologi besar dunia lainnya di era globalisasi ini, menjadi virus-virus utama yang makin melemahkan upaya-upaya pemahaman, penghayatan dan keyakinan, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (adminpkn,+36)

Pancasila pada hakekatnya sistem nilai (Value System) yang merupakan kristalisasi dari nilai – nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia, yang berakar dari unsur – unsur kebudayaan secara keseluruhan, terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Terdapat beberapa pendapat tentang asal mula Pancasila. Walaupun pendapat tentang asal mula Pancasila berbeda tetapi mempunyai kedudukan yang sama. Asal mula Pancasila dibedakan menjadi 2, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula langsung meliputi pembahasan – pembahasan menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang menunjukkan aspek langsung Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan asal mula tidak langsung lebih menunjukkan sebelum pada aspek bahan dalam dimensi historis/sejarah dimasa lampau, khususnya sebelum kemerdekaan. (916-Article Text-2345-1-1)

Kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Meskipun secara formal Pancasila menjadi dasar negara republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus, tetapi jauh sebelum tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila bahkan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat Teori nilai budaya hal ini karena Tidak bisa dipungkiri bahwa Pancasila telah ada dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dulu kala. Walaupun keberadaan Pancasila masih belum dirumuskan secara sistematis seperti saat ini namun kenyataan membuktikan bahwa masyarakatnya telah mengamalkannya. (916-Article Text-2345-1-1)

Pertumbuhan dan perkembangan budaya nasional dengan interaksi budaya lokal dan global tersebut telah memberikan kesadaran kepada pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang bersifat monopluralistik. Dengan sebuah adagium, kepribadian seperti itu dapat digambarkan dalam karakter kehidupan yang memiliki kemampuan think globally, act locally, commitmentally, and respect multiculturally (Sukadi, 2006). Karakter kemampuan atau kompetensi ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan harus diintegrasikan dan disenergikan agar dapat menjadi satu kekuatan modal sosial, budaya,

simbolik, dan kuasa bagi pembangunan bangsa dengan karakter yang dinamis. (adminpkn,+36)

Fenomena globalisasi secara historis telah terjadi seribuan tahun yang lalu. Sejak abad 19 dicatat sejumlah peristiwa ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika yang mengakibatkan Imperialisme Eropa, terjadi Revolusi Industri yang ditandai dengan berbagai penemuan transportasi kereta api dan kapal laut, telepon dan telegraf yang menghubungkan dunia. Selanjutnya pada abad 20, pasar bebas Kapitalisme berkembang luas sejak berakhirnya Perang Dingin, dan penemuan internet sebagai jejaring sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran antarbudaya. (5316-11607-1-SM)

Namun demikian globalisasi budaya dapat dipandang sebagai Imperialisme Budaya, karena yang terjadi dominasi satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Hal ini tampak jelas dengan kehadiran MacDonal'd's, Disneyland, dan Starbucks di berbagai penjuru negara. Bersamaan dengan itu dominasi bahasa Inggris sehingga terjadi invasi terhadap bahasa-bahasa lain. Kiranya perlu dipertanyakan secara kritis, benarkah semua orang di seluruh dunia ini mempunyai selera yang sama? (5316-11607-1-SM)

Teknologi informasi seperti televisi, radio, dan Internet telah memutus selera ikatan-ikatan budaya kita. Menurut Daniel Yergin pemenang Pulitzer Price bahwa akses yang lebih besar pada televisi dan Internet telah menciptakan suatu —tenunan dunia. Televisi khususnya telah masuk ke dalam rumah kita, dan sulit untuk menghindarinya. Para antropolog menunjukkan dampak televisi terhadap kebudayaan, yaitu ketika orang melihat televisi, mereka gagal berpartisipasi (dan menopang) kebudayaan yang hidup di sekitarnya dengan risiko generasi yang dibesarkan layar televisi akan kehilangan aspek kritis atas kebudayaannya. (5316-11607-1-SM)

Integrasi dan sinergi kemampuan dan kepribadian tersebut telah mampu membentuk dan menjadi karakter yang memberikan identitas nasional kepada manusia Indonesia yang bisa dijabarkan dalam penghargaan nilai-nilai. Nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian nasional tersebut terwujud dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan dan toleransi, dan menghargai keberagaman. Karakter manusia dan masyarakat Indonesia juga menonjolkan: persaudaraan umat manusia, cinta damai, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, menghargai kecerdasan, kreativitas dan inovasi, motivasi berprestasi, etos kerja, mandiri dan kewirausahaan, disiplin, kompetisi secara fair, dan bekerjasama untuk perdamaian. Sebagai satu komunitas bangsa, masyarakat Indonesia juga mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa gotong royong, menunjukkan semangat patriotisme dan kepahlawanan, menjunjung tinggi nasionalisme dan mengabdikan diri untuk dharma negara, beretika untuk menghargai lingkungan, dan mengembangkan budaya malu.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi antara lain adalah: etika dialog, komunikatif, jujur, terbuka, demokratis, setia dan patuh kepada pemimpin, serta menghargai dan mematuhi norma-norma dan hukum. Tidak kalah

pentingnya juga adalah bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan sikap hidup hemat dan bersahaja, mengakui dan menghormati keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan orientasi masa lalu masa kini dan masa depan (bandingkan dengan Pemerintah Republik Indonesia; 2010:20-22).

Lembaga pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi, juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa berbasis Pancasila dalam rangka memajukan keberadaban bangsa. Sesuai dengan visi Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) IV (2003- 2010), misalnya, maka pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan untuk mampu membentuk insan yang berkarakter dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kebijakan dasar untuk mencapai visi tersebut adalah adanya kesadaran bahwa daya saing bangsa hanya dapat dicapai dalam bingkai karakter bangsa dan peradaban yang kuat. Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan dan titik kulminasi proses pendidikan dalam jenjang pendidikan formal jelas memiliki peran dan tanggung jawab dalam memantapkan pembinaan karakter bangsa yang telah dibangun dan dikembangkan sejak pendidikan dasar. Untuk itu pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sarjana yang memiliki pengetahuan yang kuat, memahami bagaimana menjadi warganegara yang baik dan mampu memimpin kehidupan yang bermakna (Brodjonegoro, 2003).

Dewasa ini bangsa kita menghadapi arus globalisasi dengan dimensi ekonomi, budaya maupun politik. Pertanyaan mendasar pertama, apakah ideologi Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dan demokratisasi yang nyaris tanpa batas? Kedua, bagaimana cara yang dimungkinkan agar pandangan hidup Pancasila dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga mampu merespon tantangan global tersebut?

### **Metode**

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal-jurnal akademik.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Itu agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu, tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. (916- Article)

Pentingnya Pendidikan Karakter adalah karakteristik positif kepribadian yang mendasari cara orang berpikir, menata sistem nilai, bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap lingkungan sekitarnya. Tetapi, karakter bukanlah masalah kepribadian individualitas saja. Dalam Pendidikan karakter Bangsa Indonesia, bahkan, haruslah lebih didominasi bagaimana karakter bersama, sebagai satu kelompok komunitas bangsa, dapat dibangun yang mencerminkan kepribadian dan identitas nasional, yakni kepribadian Pancasila. Di sini karakter bangsa dapat didefinisikan sebagai "kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-

baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang dalam kelompok kehidupan berbangsa”. Sejalan dengan pengertian ini, karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 7). (admin pkn)

Karakter bangsa seperti ini perlu dibangun sebagai upaya kolektifsistemik masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Semua upaya ini adalah untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ipteks yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasar Pancasila. (admin pkn)

Ideal manusia menurut Pancasila adalah manusia yang secara otentik berhasil memanusiation dirinya dalam hubungannya dengan ketiga faktor esensial, yaitu dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan. Berdasarkan perspektif Pancasila, perkembangan tidak cukup dilaksanakan dalam salah satu dari ketiga dimensi tersebut, karena penekanan satu dimensi dengan mengabaikan dimensi lain berarti ekstremitas yang berbahaya bagi masyarakat. Dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan adalah lingkungan yang sama esensial dan fundamentalnya bagi perkembangan manusia, maka hubungan terhadap ketiganya serta peningkatannya harus berjalan secara seimbang. (5316-11607-1-SM)

Pemaknaan humanisme Pancasila ini dapat dipandang sebagai usaha untuk membawa kembali Pancasila sebagai wacana publik (public discourse). Pengembalian Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada gilirannya, pembudayaan humanisme Pancasila akan berkontribusi bagi penguatan karakter bangsa dalam rangka tata hubungan peradaban global. (5316-11607-1-SM)

Sampai detik ini, keadaan masyarakat di negara kita sangat memperhatikan terutama dibidang karakter. Dari segi hukum setiap hari disuguhi berita-berita mengenai kasus-kasus baru dalam hal korupsi yang dilakukan mulai dari oknum lembaga tinggi negara, oknum birokrat, kader partai, maupun pengusaha. Dunia pendidikan yang fungsi utamanya adalah membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual melainkan juga berkarakter baik mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dianggap kurang serius dalam mendidik generasi muda. Hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya masalah yang menyangkut kasus pelajar seperti: tawuran antarpelajar, kasus kriminal yang melibatkan pelajar, kasus asusila, aksi vandalisme, dan sebagainya.

Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk memfasilitasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji, menginternalisasi, mempersonalisasi nilai, dan mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri siswa serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari.

Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Dasar Hukum Humanis Terhadap Karakter Bangsa yaitu Adalah salah satu cara pendidikan pancasila merupakan satu aspek penting untuk membangun karakter generasi bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu yang merupakan produk pendidikan dan merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan: "Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pernyataan – pernyataan diatas tampak jelas bahwa pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan manusia yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangan, karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Hal ini berarti bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas, baik material, spriritual serta sosial budaya.

Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa dimulai sejak dini, hal ini dilakukan agar terciptanya masyarakat yang teratur serta memiliki nilai karakter yang dapat dijadikan contoh dalam taat peraturan atau tata tertib. Dengan berkembangnya era globalisasi yang sangat pesat, hal ini membuat hilangnya atau lunturnya Pendidikan karakter bangsa, seperti negara kita Indonesia sedang maniak terhadap K-POP atau yang sering kita kenal dengan Negara Korea. Disinilah peran yang sangat penting mengenai Pendidikan karakter bangsa sejak dini, jika sudah tertanam sejak dini, maka jika adanya pengaruh budaya dari luar maka negara kita tidak akan mudah terpengaruh dengan negara lainnya.

### **Kesimpulan**

Ideologi Pancasila secara historis merupakan kekuatan pemersatu yang cukup kuat sebagai pondasi bagi negara-bangsa Indonesia. Pendidikan Karakter perlu menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis atau ideologis pelaksanaannya. Penggunaan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis Pendidikan karakter akan mampu memberi arah pada sistem pengetahuan yang akan dibangun, sistem nilai-nilai yang akan dibina dan dikembangkan, dasar bagi pengembangan kompetensi yang akan mencerminkan karakter manusia Indonesia yang akan dibentuk, dan bagaimana pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya akan dijalankan.

**Saran**

Semoga dengan adanya penelitian mengenai Nilai Pancasila ini dapat memberikan sebuah temuan yang luar biasa agar nantinya dapat berkembang lebih baik lagi untuk peneliti, sedangkan untuk penelitian ini diharapkan menjadi bacaan atau karya ilmiah yang dapat bermanfaat dengan baik dan benar bagi para pembacanya serta dapat dijadikan referensi selanjutnya. Serta perlu juga untuk pengembangan diri untuk peneliti agar lebih membuka wacananya mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

**Daftar Referensi**

- Arianto, Ismail. (2013). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik. Vol. 1 (2) 2337-5205.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.